

**RATING KOPERASI SUMATERA BARAT
(Studi Kasus Kabupaten Agam, Tanah Datar,
Pesisir Selatan, dan Solok)**

Syafrizal Chan

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang
Email:syafrizalchan@yahoo.com

Abstrak: *Koperasi sebagai kelembagaan ekonomi semakin dibutuhkan untuk dapat berperan dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Agar dapat berperan maka koperasi harus mempunyai kinerja yang baik dan mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Untuk mengetahui bagaimana kinerja koperasi yang ada di Sumatera Barat, khususnya kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Solok maka perlu dilakukan kajian. Kajian dilakukan dengan cara mengadakan survey terhadap aspek keaktifan badan usaha, kinerja usaha, kohesivitas dan partisipasi anggota, orientasi pelayanan anggota, pelayanan masyarakat, dan kontribusi koperasi terhadap pembangunan. Dari kajian yang dilakukan ditemukan hanya terdapat sebanyak 15 unit atau 13,64 % koperasi yang termasuk kategori berkualitas, sebanyak 68 unit atau 61,82 % cukup berkualitas, 14 unit atau 12,73 % kurang berkualitas. Tidak satupun dari koperasi yang dinilai termasuk kedalam kategori sangat berkualitas, sebagai kualifikasi yang tertinggi. Dari segi aspek penilaian, yang paling baik adalah aspek keaktifan badan usaha dengan nilai rata-rata 68 dari 95 nilai maksimum atau dengan capaian nilai 71,63 %. Aspek penilaian yang paling rendah adalah aspek kontribusi koperasi terhadap pembangunan daerah dengan nilai rata-rata 7 dari 20 nilai maksimum dengan capaian nilai 33,43 %. Disarankan untuk pembinaan dan pengembangan koperasi dimasa datang agar lebih difokuskan kepada aspek pembinaan kinerja usaha, aspek orientasi pelayanan dan aspek partisipasi anggota. Koperasi yang termasuk kategori cukup berkualitas dan berkualitas disarankan agar dikelola oleh manajer yang mempunyai kemampuan konseptual, human relation dan keterampilan berusaha dengan pendidikan minimal sarjana. Manajer ini agar disiapkan oleh pemerintah, baik melalui pendidikan dan pelatihan dari manajer atau pengurus yang sudah ada, atau dengan melakukan rekrutmen sarjana menjadi manajer koperasi dengan kontrak kerja selama periode tertentu.*

Kata Kunci: *kelembagan, rating, kinerja, daya saing, dan manajer*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan penduduk, kompleksitas kehidupan masyarakat juga semakin bertambah. Berbagai permasalahan ekonomi semakin sulit dipecahkan, bahkan terdapat kecendrungan permasalahan baru terus bermunculan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dapat dilakukan secara signifikan.

Hal ini tercermin antara lain dari rendahnya pendapatan perkapita, sulitnya lapangan kerja, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta rendahnya nilai tukar pekerja pada sektor pertanian, perikanan dan kerajinan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, baik permasalahan ekonomi maupun permasalahan sosial lainnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya untuk pemecahan permasalahan ekonomi adalah dengan melakukan pemberdayaan dan pengembangan koperasi. Koperasi diberi peran dalam berbagai kegiatan ekonomi yang terkait dengan permasalahan kehidupan masyarakat. Koperasi diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, menyediakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, serta dapat berperan dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat lokal.

Berbagai macam program telah dilakukan oleh pemerintah untuk men-yehatkan koperasi sebagai sebuah badan usaha dan sebagai sebuah organisasi. Untuk perkuatan kelembagaan, pemerintah melakukan peningkatan sumberdaya manusia pengelola koperasi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Demikian pula untuk pengembangan usaha, pemerintah melibatkan koperasi dalam penyaluran berbagai sarana produksi pertanian, penyaluran kredit ketahanan pangan, serta program pemberdayaan. Akan tetapi bagaimana keberhasilan pemberdayaan dan pengembangan koperasi masih banyak menjadi pertanyaan dari berbagai pihak, karena terkesan sampai saat ini, koperasi masih belum mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Kehidupan koperasi dari waktu ke waktu belum banyak mengalami perubahan. Fenomena ini semakin menarik bila dikaitkan dengan konteks globalisasi ekonomi dan makin kompleksnya permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, serta para karyawan yang berpenghasilan rendah pada berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta.

Hingga saat ini masih sering para petani mengeluh kesulitan memperoleh pupuk untuk lahan pertaniannya akibat harga mahal, kesulitan pemasaran yang berakibat produksi mereka terjual murah, pedagang kecil kesulitan dalam memperoleh kredit untuk pembiayaan usaha, serta masyarakat miskin yang tidak punya akses lembaga perbankan. Berbagai permasalahan ini tak kunjung dapat

diatasi dengan baik. Perbankan tampak masih belum mampu dan terkesan enggan untuk menjangkau usaha rumah tangga, usaha kecil dan masyarakat kelas bawah.

Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, koperasi adalah lembaga yang paling tepat untuk menjangkau kehidupan masyarakat tersebut, karena koperasi sangat dekat dan terbiasa berhubungan dengan mereka. Koperasi yang sehat dan kuat akan dapat diandalkan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, seperti penyaluran kredit pengembangan usaha, penyaluran sarana produksi pertanian, melaksanakan program pengentasan kemiskinan, program penciptaan lapangan kerja, serta program peningkatan ketahanan pangan. Koperasi yang kuat adalah koperasi yang sehat organisasinya, kepengurusannya mempunyai dedikasi yang tinggi, memelihara nilai-nilai koperasi, melaksanakan prinsip-prinsip koperasi, kinerja keuangannya terjaga dengan baik, serta mempunyai bidang usaha yang terkait dengan kehidupan anggota. Koperasi seperti inilah yang dapat berperan, karena mereka mempunyai kompetensi dan daya saing. Koperasi ini akan dapat menangkap berbagai peluang usaha ada, menjaga kepercayaan masyarakat, dan mampu menyukseskan program pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah.

Akan tetapi permasalahannya hingga saat ini belum banyak dimiliki informasi mengenai koperasi mana saja yang berkualitas yang dapat diandalkan bersaing dengan lembaga lainnya dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bahkan terdapat anggapan banyak koperasi yang ada masih lemah, kurang sehat, dan tidak mampu bersaing. Untuk memperoleh informasi mengenai kualitas koperasi yang ada di Sumatera Barat, khususnya pada Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok maka perlu dilakukan kajian secara empirik. Kajian secara empirik akan dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai kualitas koperasi yang ada dari berbagai aspek. Dengan kajian ini maka akan dapat dilakukan pemeringkatan koperasi (rating koperasi) pada daerah-daerah tersebut.

Dalam dunia usaha pelaksanaan rating merupakan suatu hal yang lazim dan biasa dilakukan, baik oleh lembaga pemeringkat dalam dan luar negeri. Pemeringkatan dilakukan oleh lembaga independen yang mempunyai tanggungjawab dan reputasi yang handal. Dengan rating ini maka suatu usaha

dapat mengetahui bagaimana peformanya dalam lingkungan usaha dan prospeknya dimasa yang akan datang. Rating dijadikan dasar untuk membangun kepercayaan guna menerbitkan obligasi, membangun mitra kerja, mendapatkan pembiayaan dari perbankan, serta meningkatkan harga saham.

Dalam kehidupan koperasi, kegiatan rating merupakan suatu hal yang baru dan belum banyak dilakukan. Kegiatan rating koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat merupakan langkah yang maju dan berani. Karena melalui rating ini akan dapat diketahui bagaimana kualitas koperasi yang ada pada periode tertentu. Koperasi yang ada akan dapat dipetakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan. Pengembangan koperasi dimasa datang harus mempedomani berbagai aspek penilaian yang digunakan dalam rating ini, karena indikator dan tolok ukurnya sangat jelas. Tujuan dilakukannya rating koperasi adalah untuk: a) mengetahui kinerja koperasi pada suatu periode tertentu; b) mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip koperasi; c) mengevaluasi penerapan kaidah-kaidah bisnis; d) sebagai masukan bagi pembina membuat kebijakan, e) sebagai informasi bagi pihak eksternal dan pedoman dalam membangun kerjasama dan kemitraan.

Sebagai sebuah badan usaha, pengelolaan koperasi harus tunduk kepada kaidah-kaidah efisiensi, produktivitas, dan inovasi, serta berdaya saing. Hal ini menjadi sangat penting, karena koperasi dihadapkan kepada lingkungan usaha yang makin kompetitif. Ditengah kehidupan masyarakat pada saat ini terdapat sangat beragam bentuk usaha, baik usaha yang berbadan hukum, seperti perbankan umum, bank perkreditan rakyat, asuransi, lembaga penyewaan, pegadaian, serta beragam usaha perdagangan dan produksi. Demikianlah pula usaha-usaha yang tidak berbadan hukum yang melakukan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik perkotaan hingga pedesaan, seperti arisan kelompok, para pelepas uang/rentenir (*money lender*), dan berbagai usaha pemberdayaan yang dibentuk pemerintah untuk menyukkseskan berbagai program pembangunan.

Sebagai kumpulan orang yang mempunyai tujuan untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan sosial, pengelolaan koperasi harus mengacu

kepada nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi tidak dapat meninggalkan nilai-nilai yang ada, karena pada hakekatnya koperasi mempunyai dasar-dasar pengelolaan bagaimana membangun diri dan martabat setiap orang.

Sebagai akselerasi pembangunan, terdapat makna bahwa kehidupan koperasi tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai alat pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Koperasi dapat berperan dalam berbagai program pembangunan, serta berbagai kebijakan untuk stabilisasi dan dinamisasi perekonomian. Koperasi dapat dijadikan lembaga pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penyedia kebutuhan masyarakat lokal, dan alat untuk pengendalian harga (pengendalian inflasi di daerah).

Karena itu koperasi harus dikelola dengan baik, tidak boleh dikelola menurut kehendak individu-individu tertentu saja. Koperasi adalah badan usaha dan organisasi yang moderen yang dikendalikan berdasarkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), berbagai ketentuan pemerintah serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.25 Tahun 1992). Pengelolaan koperasi yang mengikuti kaidah-kaidah tersebut akan menjadi koperasi yang sehat dan moderen. Artinya akan menjadi badan usaha yang kuat dan mampu bersaing dalam lingkungan usaha yang kompetitif, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan berperan dalam pembangunan masyarakat pada umumnya.

Rating koperasi adalah suatu upaya positif untuk melihat sejauh mana kesehatan koperasi sebagai sebuah badan usaha, maupun sebagai sebuah organisasi yang merupakan kumpulan orang. Dengan rating akan dapat diketahui kesehatan dan kemampuan koperasi sebagai sebuah badan usaha. Semakin berkualitas sebuah koperasi, berarti semakin memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai kegiatan usaha guna pemberdayaan anggotanya, melayani masyarakat umum, dan berperan dalam pembangunan. Oleh sebab itu pelaksanaan rating koperasi akan memberikan berbagai manfaat, baik internal, maupun secara eksternal.

Manfaat Rating

Melakukan rating koperasi berarti mengevaluasi kinerja koperasi dari berbagai aspek kehidupannya sebagai sebuah badan usaha, maupun sebagai

sebuah organisasi. Dengan demikian maka rating koperasi akan mencerminkan kesehatan dan sekaligus permasalahan yang dihadapi masing-masing koperasi. Rating koperasi yang dilaksanakan akan bermanfaat bagi berbagai pihak berikut ini: (1) Bagi Pemerintah, sebagai dasar penerapan pola pembinaan, sebagai pedoman penetapan prioritas pengembangan dan penyaluran dana, sebagai framework penetapan kebijakan, dan sebagai pedoman klasifikasi koperasi; (b) Bagi Pengguna Layanan, sebagai jaminan dan kredibilitas dalam melakukan transaksi; (c) Bagi Koperasi, untuk mengetahui permasalahan organisasi, sebagai simbol dan kebanggaan bagi pemilik (*goodwill*) kemajuan usaha, modal dan pengakuan untuk dapat ikut serta dalam program pemerintah (*pass website*) untuk diperkenalkan; (d) Bagi Lembaga Perbankan, referensi pengucuran kredit dan pedanaan, indikator pola bapak angkat untuk penyaluran kredit bagi masyarakat.

Daerah dan Koperasi Yang Dirating

Koperasi yang dirating adalah koperasi yang berada pada empat wilayah administratif pemerintahan, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok.

Jumlah koperasi yang dirating ditentukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat. Rincian koperasi yang dirating pada Kabupaten Agam ditetapkan sebanyak 30 koperasi, Kabupaten Tanah Datar 25 koperasi, Kabupaten Pesisir Selatan 25 koperasi, dan Kabupaten Solok 30 koperasi. Dengan demikian terdapat sebanyak 110 buah koperasi yang dirating berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Jenis koperasi yang dirating pada tiap-tiap daerah cukup beragam, mulai dari Koperasi Unit Desa, Koperasi Pagawai Negeri (KPN), koperasi sekolah, koperasi pedagang Pasar, Koperasi Pemberdayaan Masyarakat (Koperasi Madani). Secara umum keseluruhan koperasi ini dapat dikelompokkan atas tiga kelompok, yaitu koperasi masyarakat, koperasi fungsional, dan koperasi sekolah.

METODE PELAKSANAAN RATING

Agar pelaksanaan rating koperasi berjalan dengan baik , maka harus terdapat skedul kegiatan yang jelas mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan hasil. Tahapan kegiatan rating koperasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan form isian (borang) sebagai dasar untuk penilaian 6 aspek penilaian koperasi berkualitas
2. Mematangkan teknis pemeringkatan dan teknis menghitung pembobotan yang akan dilakukan
3. Melaksanakan sosialisasi kepada koperasi yang akan dirating pada 4 kabupaten
4. Membagikan form isian kepada manajemen koperasi yang akan diperingkat untuk diisi dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
5. Manajemen koperasi mengirimkan form isian kepada tim penilai
6. Tabulasi data masing-masing koperasi kedalam sistem pengolahan pemeringkatan.
7. Pengolahan data untuk menentukan nilai masing-masing koperasi sebagai dasar pemeringkatan
8. Pembuatan laporan hasil pemeringkatan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat
9. Desiminasi hasil rating pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat
10. Pengumuman hasil kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya dengan kehidupan koperasi

Dasar Pelaksanaan Rating

Untuk dapat menggambarkan secara utuh mengenai badan usaha koperasi, maka landasan berfikir pengembangan sistem pemeringkatan didasarkan pada 3 (tiga) sifat koperasi yaitu: 1) Koperasi sebagai badan usaha; 2) Koperasi sebagai kumpulan orang dan 3) Koperasi sebagai akselerasi pembangunan.

Penjabaran dari ketiga sifat koperasi tersebut mencakup 6 aspek koperasi yang berkualitas, beserta berbagai komponen yang terkait dengan aspek masing-

masing. Aspek dan berbagai komponen yang menjadi indikator penilaian adalah sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Komponen Penilaian	Nilai Maksimum
1.	Keaktifan badan usaha	1. Pelaksanaan RAT dan rapat pengurus/pengawas	15
		2. Manajemen pengawasan	15
		3. Keberadaan dan tingkat realisasi RK serta RAPB	10
		4. Rasio kondisi operasional, kegiatan/ usaha	10
		5. Kinerja kepengurusan	10
		6. Tertib administrasi (organisasi, usaha dan keuangan)	15
		7. Keberadaan sistem informasi	10
		8. Kemudahan untuk mendapatkan informasi	10
2.	Kinerja usaha	9. Struktur permodalan	10
		10. Tingkat kesehatan kondisi keuangan	60
		11. Kemampuan bersaing koperasi	15
		12. Strategi bersaing koperasi	15
		13. Inovasi yang dilakukan	10
3.	Kohesivitas dan partisipasi anggota	14. Kohesivitas anggota	15
		15. Rasio peningkatan jumlah anggota	15
		16. Persentase jumlah anggota melunasi simpanan wajib	15
		17. Persentase besaran simpanan selain SP dan SW	15
		18. Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota	15
		19. Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota	15
		20. Pola pengkaderan	15
4.	Orientasi pelayanan anggota	21. Pendidikan dan pelatihan anggota	30
		22. Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota	35
		23. Transaksi usaha koperasi dengan usaha/kepentingan anggota	80
5.	Pelayanan masyarakat	24. Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non anggota	5
		25. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelanan sosial	5
		26. Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang disebarkan koperasi	5
		27. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi.	5
6.	Kontribusi terhadap pembangunan	28. Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak	10
		29. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	5
		30. Tingkat upah karyawan	5

Kualifikasi Hasil Rating

Berdasarkan ketentuan yang ada pada keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.22/PER/M.KUKM/IV/2007

tentang Sistem Pemeringkatan Koperasi, maka koperasi yang dirating kualifikasinya didasarkan kepada penilaian yang dilakukan. Kualifikasi koperasi yang dinilai adalah terdiri dari Sangat Berkualitas, Berkualitas, Cukup Berkualitas, Kurang Berkualitas, dan Tidak Berkualitas. Setiap kualifikasi mempunyai rentang nilai tertentu sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

No.	Nilai	Kualifikasi
1	419-500	Sangat Berkualitas
2	340-419	Berkualitas
3	260-339	Cukup Berkualitas
4	180-259	Kurang Berkualitas
5	< 180	Tidak Berkualitas

Dalam pelaksanaannya, jika koperasi tidak mengisi form/borang isian, tidak memiliki data-data yang dibutuhkan, buku laporan RAT tidak ada, dan ketika dikunjungi (*site visit*) tidak ditemui maka koperasi tersebut dikategorikan tidak terqualifikasi.

Data-data yang diperoleh berdasarkan borang isian yang didistribusikan kepada koperasi-koperasi yang dirating diolah dengan menggunakan komputer. Untuk pengolahan data maka terlebih dahulu dibangun sistem pengolahan data sebagai suatu sistem, sehingga bila data dimasukkan kedalam sistem yang dibangun akan keluar kualifikasi masing-masing koperasi yang dinilai. Dengan demikian maka akan terdapat data rating sebanyak 110 buah koperasi yang dinilai.

Pelaksanaan rating dilakukan selama 120 hari kerja, yaitu mulai sejak persiapan sampai dengan laporan akhir. Kegiatan dilakukan mulai dari tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan 5 November 2010. Waktu pelaksanaan digunakan untuk membangun konsep dan membangun sistem pengolahan data, sosialisasi ke kabupaten dan kota, pembagian borang penggalan data, pengumpulan borang, pengolahan data, visitasi kelapangan, penarikan kesimpulan, desiminasi hasil, dan penyampaian laporan pelaksanaan rating.

HASIL RATING

Berdasarkan landasan berfikir dan metode pelaksanaan rating sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai Pedoman Pemeringkatan Koperasi, maka

kualifikasi hasil rating dinyatakan Sangat Berkualitas, Berkualitas, Cukup Berkualitas, Kurang Berkualitas, dan Tidak Berkualitas.

Borang isian masing-masing koperasi, bukti-bukti pendukung yang dilampirkan, buku pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan kunjungan kelapangan (*site visit*), maka hasil rating koperasi yang dilakukan akan dikemukakan berdasarkan kualifikasi rating, menurut aspek penilaian, dan menurut daerah yang dinilai yaitu, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah datar, Kabupeten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok.

Rekapitulasi Hasil Rating

Dari penilaian yang dilakukan terhadap 110 buah koperasi pada empat daerah kabupaten di Sumatera Barat kualifikasi koperasi yang dirating sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel terlihat bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan terdapat sebanyak 15 unit atau 13,64 % dari 110 unit koperasi yang dirating mempunyai kualifikasi berkualitas dan tidak satupun dari koperasi yang dinilai termasuk kedalam kategori sangat berkualitas sebagai kualifikasi tertinggi.

Sebagian besar koperasi dinilai atau sebanyak 68 unit (61,82 %) hanya termasuk kedalam kualisifikasi cukup berkualitas. Bahkan terdapat sebanyak 13 unit atau 11,82 dari koperasi yang diusulkan tidak dapat dinilai dan tidak bisa diberikan kualisifikasinya (tidak terkualifikasi). Hal ini disebabkan karena koperasi yang bersangkutan tidak mengisi borang penggalian data yang dibutuhkan sebagai dasar penilaian, tidak memiliki buku laporan pelaksanaan RAT, dan ketika dikunjungi (*site visit*) kelapangan tidak ditemui.

No.	Kualifiaksi	Jumlah	Persentase
1	Sangat Berkualitas	0	00,00
2	Berkualitas	15	13,64
3	Cukup Berkualitas	68	61.82
4	Kurang Berkualitas	14	12,73
5	Tidak Berkualitas	0	00,00
6	Tidak Terkualifikasi	13	11,82
	Total	110	100,00

Selanjutnya bila dilihat dari aspek-aspek yang dinilai, sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut ini, aspek yang relatif baik adalah aspek keaktifan usaha dengan nilai 68 atau dengan capaian 71,63 % dari nilai maksimum. Aspek lain yang cukup baik adalah aspek orientasi terhadap pelayanan anggota dengan nilai 93 atau dengan capaian nilai 63,85 %, dan aspek kohesifitas dan partisipasi anggota dengan dengan nilai 67 atau dengan capaian nilai 63,62 % dari nilai maksimum.

**REKAPITULASI ASPEK PENILAIAN KOPERASI
TAHUN 2010**

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI	NILAI MAKSIMUM	PERSENTASE CAPAIAN
1	Keaktifan Badan Usaha	68	95	71.63
2	Kinerja Usaha	52	115	45.10
3	Kohesivitas dan Partisipasi	67	105	63.62
4	Orientasi Pelayanan Anggota	93	145	63.85
5	Pelayanan Masyarakat	8	20	40.30
6	Kontribusi terhadap Pembangunan	7	20	33.43
Total		294	500	58.81

Aspek lain yang kurang baik adalah aspek kontribusi koperasi terhadap pembangunan daerah dengan nilai 7 atau dengan pencapaian nilai 33,43 %, aspek pelayanan masyarakat dengan nilai 8 atau dengan pencapaian nilai 40,30 %, dan aspek kinerja usaha dengan pencapaian nilai hanya 45,10 % dari nilai maksimum.

Aspek kinerja usaha ini mempunyai bobot penilaian yang cukup tinggi, sehingga bila koperasi mempunyai nilai yang rendah maka akan berdampak cukup besar terhadap penurunan kualifikasi rating. Komponen penilaian pada aspek kinerja usaha ini adalah struktur permodalan, kemampuan penyediaan dana, peningkatan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan perolehan sisa hasil usaha. Aspek kinerja usaha merupakan indikator utama dalam menilai kesehatan koperasi sebagai sebuah badan usaha.

3.2 Rating Koperasi Kabupaten Agam

Pada Kabupaten Agam terdapat sebanyak 30 unit koperasi yang dinilai untuk ditentukan kualifikasinya. Hasil penilaian koperasi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Berdasarkan kualifikasi rating, tidak ada satupun dari koperasi yang ada di kabupaten Agam tergolong kedalam kualifikasi sangat berkualitas. Nilai tertinggi hanya berkualitas, yaitu sebanyak 4 unit koperasi atau 13,33 % dari 30 unit koperasi yang dinilai. Sebagian besar dari koperasi yang ada hanya termasuk kedalam kualifikasi cukup berkualitas, yaitu sebanyak 20 unit atau 66,67 % dari keseluruhan koperasi. Sedangkan untuk kualifikasi kurang berkualitas terdapat sebanyak 6 unit koperasi atau 20,00 % dari koperasi yang dinilai. Namun yang cukup menggembirakan di Kabupaten Agam tidak ada koperasi yang dinilai yang termasuk kedalam kualifikasi tidak berkualitas dan tidak terkuualifikasi. Keseluruhan koperasi yang dinilai menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap perlunya rating, sehingga semuanya mengembalian form isian, menyediakan data dibutuhkan oleh tim penilai, baik ketika dikunjungi maupun oleh Dinas Koperasi sendiri yang menyediakan berbagai informasi dibutuhkan untuk keperluan rating, baik penyediaan buku RAT maupun catatan dan informasi lainnya.

Selanjutnya bila dilihat lebih lanjut dari aspek-aspek yang dinilai yaitu aspek keaktifan badan usaha, aspek kinerja usaha, aspek kohesivitas dan partisipasi anggota, aspek pelayanan anggota, dan aspek kontribusi koperasi terhadap pembangunan daerah, aspek yang relatif baik adalah aspek kohesivitas dan partisipasi anggota dengan nilai 71 dengan capaian 67,68% dari nilai maksimum. Secara umum koperasi yang ada di kabupaten Agam dilihat dari unit usahanya relatif mempunyai keterkaitan yang baik dengan anggotanya. Sejalan dengan ini tingkat partisipasi anggotanya juga cukup tinggi. Artinya karena usaha koperasi mempunyai keterkaitan yang baik dengan kehidupan anggota maka anggota memanfaatkan pelayanan yang disediakan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Hal ini bila dilihat dari segi prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan sebagai pelanggan sudah mendekati harapan.

Akan tetapi yang masih kurang baik dalam penilaian yang dilakukan adalah aspek kontribusi koperasi terhadap pembangunan daerah. Artinya koperasi-koperasi yang ada masih mempunyai kontribusi yang minimal dalam penyediaan lapangan kerja, pelayanan kepada non anggota, pengentasan kemiskinan, dan menggunakan dana pengembangan untuk wilayah kerja.

Sebagian besar koperasi masih memfokuskan diri kepada aspek-aspek internal. Secara lebih rinci kualifikasi untuk masing-masing koperasi yang dinilai sebagaimana terdapat pada lampiran laporan.

**REKAPITULASI ASPEK PENILAIAN KOPERASI KABUPATEN AGAM
TAHUN 2010**

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI	NILAI MAKSIMUM	PERSENTASE CAPAIAN
1	Keaktifan Badan Usaha	64	95	67.44
2	Kinerja Usaha	60	115	51.77
3	Kohesivitas dan Partisipasi	71	105	67.68
4	Orientasi Pelayanan Anggota	83	145	57.36
5	Pelayanan Masyarakat	11	20	53.33
6	kontribusi terhadap Pembangunan	9	20	43.50
Total		297	500	59.44

Uraian yang dikemukakan maka dapat disimpulkan, bahwa di Kabupaten Agam masih sangat sedikit koperasi yang berkualitas, hanya sebanyak 4 unit atau 13 % dari koperasi yang dirating. Keempat unit koperasi yang berkualitas tersebut adalah KPN Kantor Bupati Agam, KUD Matur Saiyo, KPRI Kecamatan Palembayan, dan Koperasi Nusa Indah Jorong Sungai Tuak Kecamatan Tilatang Kamang. Sedangkan dilihat dari aspek penilaian, maka keaktifan badan usaha dan kohesivitas dan partisipasi anggota relatif baik, dibandingkan dengan aspek penilaian lainnya.

Aspek yang masih kurang adalah kontribusi terhadap pembangunan dengan capaian penilaian 43,50 % dari capaian kinerja atau dengan nilai 9 dari nilai 20 yang dapat dicapai. Dengan demikian pada Kabupaten Agam disarankan agar pembinaan dan pengembangan koperasi dimasa yang akan datang difokuskan kepada pemecahan permasalahan yang ditemui dari penilaian yang dilakukan ini, yaitu pembinaan aspek kinerja usaha dan orientasi pelayanan terhadap anggota, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Kabupaten Tanah Datar

Pada Kabupaten Tanah Datar terdapat sebanyak 25 unit koperasi yang dinilai untuk dirating guna menentukan kualifikasinya. Sebagaimana pada daerah lainnya koperasi yang dinilai juga cukup beragam, yaitu koperasi masyarakat,

koperasi pegawai negeri, koperasi guru sekolah, dan jenis koperasi lainnya. Hasil penilain koperasi yang dirating sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**REKAPITULASI KUALIFIKASI KOPERASI KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2010**

NO	KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Berkualitas	0	0.00
2	Berkualitas	3	12.00
3	Cukup Berkualitas	17	68.00
4	Kurang Berkualitas	4	16.00
5	Tidak Berkualitas	0	0.00
6	Tidak Terkualifikasi	1	4.00
	TOTAL	25	100.00

Tabel terlihat seperti daerah lain, koperasi yang dirating tidak satupun yang memenuhi kualifikasi sangat berkualitas. Kualifikasi yang paling tinggi hanya kualifikasi berkualitas, yaitu terdapat sebanyak 3 unit koperasi atau 12,00 % dari keseluruhan koperasi yang dinilai. Koperasi dimaksud adalah Koperasi Pendidikan Dasar/Karyawan (KPK/KPD), Koperasi Indo Jalito Dharma Wanita, dan Koperasi Penyuluh Pertanian Tanah Datar. Ketiga koperasi ini mempunyai nilai yang cukup baik untuk keseluruhan aspek penilaian yang dilakukan yaitu, keaktifan badan usaha, kinerja usaha, kohesivitas dan partisipasi anggota, orientasi pelayanan pada anggota, pelayanan pada masyarakat, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Kebanyakan dari koperasi yang dinilai di Kabupaten Tanah Datar hanya termasuk kualifikasi cukup berkualitas, yaitu sebanyak 17 unit koperasi atau 68,00 % dari 25 unit. Koperasi yang termasuk kedalam kategori cukup berkualitas ini umumnya adalah koperasi yang mempunyai kelemahan dari aspek-aspek penilaian yang dilakukan, terutama pada aspek kontribusi terhadap pembangunan, pelayanan pada anggota, dan aspek kinerja usaha. Kemudian sebanyak 4 unit koperasi atau 16,00 % koperasi yang dinilai tergolong kedalam kualifikasi kurang berkualitas. Namun dari penilaian yang dilakukan tidak satu dari koperasi yang ada termasuk kualifikasi tidak berkualitas. Dalam pelaksanaan rating koperasi di Kabupaten Tanah Datar terdapat satu buah koperasi yang tidak dapat diberikan kualifikasinya karena data-data yang dibutuhkan tidak diberikan, dan ketika

dikunjungi pengurus koperasi yang bersangkutan tidak berada ditempat, sedangkan buku laporan RAT juga tidak ada.

Bila dilihat dari aspek-aspek yang dinilai, aspek yang relatif baik adalah aspek keaktifan badan usaha dengan nilai 68 dari nilai maksimum dengan capaian nilai 71,68 %, aspek orientasi pelayanan anggota dengan nilai 97 dari nilai maksimum atau dengan nilai capaian 67,16 %, aspek kohesivitas dan partisipasi anggota dengan nilai 61 dari nilai maksimum atau dengan nilai capaian 58,50 %. Sedangkan aspek yang jelek adalah aspek kontribusi terhadap pembangunan seperti, ketaatan dalam membayar pajak, kemampuan penyerapan tenaga kerja, dan gaji karyawan masih dibawah upah minimum. Demikian pula aspek pelayanan kepada masyarakat hanya mempunyai nilai 6 dari nilai maksimum atau dengan capaian nilai 31,43 % Aspek kinerja usaha juga mempunyai nilai yang relatif kurang, hanya mempunyai nilai 47 dari nilai maksimum atau dengan pencapaian nilai 40,54 %.

**REKAPITULASI ASPEK PENILAIAN KOPERASI KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2010**

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI	NILAI MAKSIMUM	PERSENTASE CAPAIAN
1	Keaktifan Badan Usaha	68	95	71.68
2	Kinerja Usaha	47	115	40.54
3	Kohesivitas dan Partisipasi	61	105	58.50
4	Orientasi Pelayanan Anggota	97	145	67.16
5	Pelayanan Masyarakat	6	20	31.43
6	kontribusi terhadap Pembangunan	4	20	20.00
Total		284	500	56.76

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat sebanyak 3 unit atau 12,00 % dari koperasi yang dinilai yang termasuk kategori berkualitas di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan berdasarkan aspek penilaian yang relatif baik adalah aspek keaktifan badan usaha, aspek orientasi pelayanan terhadap anggota, dan aspek kohesivitas dan partisipasi anggota. Oleh karena itu disarankan agar pembinaan dan pengembangan koperasi di Kabupaten Tanah Datar difokuskan kepada aspek yang masih relatif kurang baik, yaitu kontribusi terhadap pembangunan, pelayanan terhadap masyarakat, dan perbaikan kinerja usaha, yaitu yang menyangkut dengan tata kelola koperasi sebagai sebuah badan usaha (*good cooperative governace*).

Kabupaten Pesisir Selatan

Hasil rating koperasi kabupaten Pesisir Selatan dapat di lihat pada tabel dibawah ini. Dari tabel terlihat bahwa tidak satupun dari koperasi yang dinilai di Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kedalam kategori sangat berkualitas. Hanya sebanyak 4 unit koperasi atau 13,33 % yang masuk kualifikasi berkualitas yaitu, Koperasi Pegawai Negeri (KPNG) Linggo Abadi, KPN Kencana BKKBN, Primkopad DIM 0311, dan KPRI Lenggayang. Sedangkan sebanyak 14 unit koperasi atau 46,67 % berkualifikasi cukup berkualitas dan 4 unit koperasi atau 13,33% memperoleh kualifikasi kurang berkualitas. Dari total koperasi yang di usulkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Pesisir Selatan, sebanyak 8 unit koperasi atau 26,67 % tidak terkualifikasi. Tidak terkualifikasinya beberapa koperasi ini karena tidak tersedianya data koperasi yang bersangkutan karena tidak mengembalikan formulir pengalihan data, dan ketika dikunjungi berada di tempat.

REKAPITULASI KUALIFIKASI KOPERASI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010

NO	KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Berkualitas	0	0.00
2	Berkualitas	4	13.33
3	Cukup Berkualitas	14	46.67
4	Kurang Berkualitas	4	13.33
5	Tidak Berkualitas	0	0.00
6	Tidak Terkualifikasi	8	26.67
	TOTAL	30	100.00

Dari hasil rating koperasi ini dapat di simpulkan bahwa lebih dari separuh koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan kualifikasi cukup berkualitas dan berkualitas, sekitar 40 % koperasi mendapatkan kualifikasi kurang dan tidak terkualifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan cukup memprihatinkan karena banyaknya koperasi yang termasuk kategori cukup dan kurang yang berkualitas.

Rating koperasi juga melihat kinerja koperasi dari beberapa aspek penilaian seperti, keaktifan badan usaha, kinerja usaha, kohesivitas dan partisipasi, orientasi pelayanan anggota, pelayanan masyarakat dan kontribusi terhadap pembangunan. Total penilaian yang diperoleh adalah 285 dari total nilai

500 atau dengan persentase capaian 57,03 %. Jika dilihat dari masing masing aspek penilaian, seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut ini tampak bahwa orientasi pelayanan anggota memperoleh persentase capaian yang paling tinggi yaitu 69,46 %, diikuti oleh keaktifan badan usaha dengan persentase capaian 68,22 %. Sedangkan aspek kohesivitas dan partisipasi anggota berada pada posisi ketiga tertinggi dengan persentase capaian 53,06 %. Ketiga aspek ini berada diatas 50%. Sedangkan tiga aspek lainnya menunjukkan persentase capaian dibawah 50% yaitu kinerja usaha 43,11%, pelayanan kepada masyarakat 38,81% dan kontribusi terhadap pembangunan 32,86%.

**REKAPITULASI ASPEK PENILAIAN KOPERASI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2010**

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI	NILAI MAKSIMUM	PERSENTASE CAPAIAN
1	Keaktifan Badan Usaha	65	95	68.22
2	Kinerja Usaha	50	115	43.11
3	Kohesivitas dan Partisipasi	56	105	53.06
4	Orientasi Pelayanan Anggota	101	145	69.46
5	Pelayanan Masyarakat	8	20	38.81
6	kontribusi terhadap Pembangunan	7	20	32.86
Total		285	500	57.03

Berdasarkan aspek penilaian sebagaimana yang telah dikemukakan dapat di simpulkan bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan aspek penilaian yang masih rendah adalah aspek kinerja usaha. Aspek penilaian kinerja usaha merupakan aspek penting bagi tumbuh kembangnya koperasi, karena pada aspek ini yang dinilai adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengalokasian sumber daya serta pengendalian dan pengawasan. Selain itu, aspek ini juga melihat tertib administrasi, transparansi informasi dan keberadaan sistim informasi.

Pada aspek pelayananan masyarakat, koperasi di Pesisir Selatan mempunyai nilai yang relatif rendah. Aspek Pelayanan terhadap masyarakat adalah merupakan tujuan lain dari pendirian koperasi. Pelayanan terhadap masyarakat adalah berupa penjualan produk koperasi kepada non anggota, tanggung jawab sosial koperasi pada lingkungan kerja, serta transparansi informasi kepada masyarakat. Sedangkan aspek kontribusi terhadap pembangunan harus pula ditingkatkan karena pendirian koperasi juga ditujukan untuk

memberikan kontribusi terhadap pembangunan dengan cara menjadikan koperasi patuh untuk membayar pajak, menyerap tenaga kerja yang banyak dan mampu memberikan kompensasi diatas upah minimum.

Dari persentase capaian beberapa aspek penilaian, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga aspek penilaian yang mempunyai persentase capaian kurang dari 50%. Implikasi dari hasil penilaian ini adalah perlunya perencanaan yang matang dari pembinaan yang akan di lakukan oleh Kabupaten dan Propinsi Sumatera Barat. Pembinaan tersebut bisa berupa konsultasi dan pelatihan. Konsultasi terhadap koperasi bisa berupa rekrutmen manajer koperasi, memberikan informasi tentang dana dengan biaya yang murah, mengeluarkan aturan tentang gaji, dana untuk pengembangan koperasi dan dana untuk tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Sedangkan pelatihan sebaiknya di fokuskan pada aspek dengan persentase capain terendah. Untuk kinerja usaha sebaiknya di fokuskan pada manajemen keuangan, operasional, pemasaran, studi kelayakan dan manajemen strategi. Dengan adanya pelatihan diharapkan aspek aspek fungsional manajemen dan strategi bisnis dapat di tingkatkan sehingga kinerja usaha meningkat. Kalau kinerja usaha meningkat maka akan berkontribusi terhadap penyerapan kerja dan gaji karyawan yang memadai.

Sedangkan aspek kontribusi terhadap pembangunan difokuskan pada lambatnya pembayaran pajak yang berupa pelatihan penyusunan laporan keuangan yang berbasis komputer dan pelatihan perhitungan pendapatan kena pajak, baik pendapatan karyawan maupun pendapatan badan (koperasi). Diharapkan dengan adanya pemahaman tentang proses penyusunan laporan keuangan berbasis komputer dan perhitungan pajak pendapatan maka penyampaian SPT lebih cepat dan akurat sehingga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Kabupaten Solok

Kabupaten Solok merupakan kabupaten keempat yang dilakukan pemeringkatan koperasinya. Jumlah koperasi yang di peringkat adalah 25 unit koperasi yang terletak merata di wilayah Kabupaten Solok. Dari tabel berikut

terlihat dari koperasi yang di peringkat, tidak satupun koperasi yang mendapat kualifikasi sangat berkualitas atau dengan nilai diatas 419. Hanya sebanyak 4 unit koperasi atau 16.00 % yang mendapat kualifikasi berkualitas dengan rentang nilai 348 sampai 350, yaitu KPRI Buah Nusantara, KPRI Handayani Kecamatan Kubu, KUD Manunggal PIR-BUN Kayu Jao dan KPRI KOGUTAL. Sedangkan 17 unit koperasi atau 68.00% mendapat kualifikasi cukup berkualitas dan sebanyak 4 unit koperasi atau 16.00% tidak terkualifikasi karena tidak mengembalikan borang isian yang diberikan, laporan RAT tidak ada pada Dinas Koperasi, dan ketika dikunjungi kelapangan pengurusnya tidak berada ditempat.

**REKAPITULASI KUALIFIKASI KOPERASI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2010**

NO	KUALIFIKASI	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Berkualitas	0	0.00
2	Berkualitas	4	13.33
3	Cukup Berkualitas	17	56.67
4	Kurang Berkualitas	0	0.00
5	Tidak Berkualitas	0	0.00
6	Tidak Terkualifikasi	4	13.33
	TOTAL	25	83.33

Secara keseluruhan rating koperasi di Kabupaten Solok cukup baik karena lebih 50 % dari koperasi yang di rating menunjukkan kualifikasi cukup berkualitas dan bahkan sebanyak 4 unit koperasi atau 13,33 % termasuk kategori berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi mempunyai kesadaran baik dalam memberikan informasi kepada pihak ke tiga, khususnya peringkatan ini.

Aspek penilaian koperasi dalam rating ini menggunakan enam kriteria yaitu Keaktifan Badan Usaha, Kinerja Usaha, Kohesivitas dan Partisipasi Anggota, Orientasi Pelayanan Anggota, Pelayanan Masyarakat, dan Kontribusi terhadap pembangunan. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa total nilai dari beberapa aspek penilaian adalah 310 dengan capaian 62,00 %. Aspek penilaian Keaktifan Badan Usaha mempunyai nilai terbaik dengan nilai 75 dengan capaian 79,20 %, sedangkan aspek penilaian lain yang juga cukup baik adalah kohesivitas dan partisipasi anggota mempunyai nilai 79 dengan capaian nilai 75,24 %, aspek orientasi pelayanan anggota mempunyai nilai 89 dengan capaian nilai 61,41%.

Sedangkan aspek yang kurang baik adalah aspek kinerja usaha dengan nilai hanya 52 dengan capaian 44,97 %, aspek pelayanan masyarakat mempunyai nilai 8 dengan capaian nilai 37,62 %, dan aspek kontribusi terhadap pembangunan dengan nilai paling rendah yaitu 7 dengan capaian nilai hanya 37,38 %.

REKAPITULASI ASPEK PENILAIAN KOPERASI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2010

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI	NILAI MAKSIMUM	PERSENTASE CAPAIAN
1	Keaktifan Badan Usaha	75	95	79.20
2	Kinerja Usaha	52	115	44.97
3	Kohesivitas dan Partisipasi	79	105	75.24
4	Orientasi Pelayanan Anggota	89	145	61.41
5	Pelayanan Masyarakat	8	20	37.62
6	kontribusi terhadap Pembangunan	7	20	37.38
Total		310	500	62.00

Secara umum penilaian koperasi di Kabupaten Solok dilihat dari beberapa aspek yang dinilai terlihat cukup baik dengan capaian nilai 62,00 %, yaitu Keaktifan Badan Usaha, Kohesivitas dan Partisipasi Anggota, dan Orientasi Pelayanan Anggota. Aspek penilaian yang kurang baik adalah aspek Kinerja Usaha, Pelayanan Masyarakat, dan Kontribusi Koperasi Terhadap Pembangunan.

Untuk pembinaan dimasa yang akan datang, maka pemerintah harus menitik beratkan pada aspek penilaian yang masih kurang, seperti Peningkatan Kinerja Usaha, Pelayanan Terhadap Masyarakat, dan Kontribusi Terhadap Pembangunan. Untuk aspek penilaian kinerja usaha, koperasi harus menjaga dengan baik struktur modalnya, yaitu modal sendiri dan modal asing. Selain itu, koperasi juga harus menjaga tingkat likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas serta aktifitas usaha agar bisa sustainable dimasa datang. Selain itu koperasi juga harus meningkatkan kemampuan bersaing dengan cara meningkatkan posisi tawar melalui disains strategi bersaing dan inovasi produk.

Pada aspek pelayanan terhadap masyarakat, koperasi sebaiknya meningkatkan partisipasi non anggota dalam pelayanannya. Koperasi juga harus dapat menunaikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan transparan dalam menyediakan informasi sehingga tidak terjadi *asymmetry information*. Selain itu, koperasi di Kabupaten Solok juga harus makin meningkatkan perannya dalam pem-

bangunan daerah dengan memberikan kontribusi pembayaran pajak dengan cepat dan akurat, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memberikan tingkat upah yang memadai kepada karyawan sehingga secara ekonomi akan memberikan *multiplier effect*.

Implikasi dari temuan penilaian dapat berupa pembinaan terhadap koperasi tersebut seperti konsultasi dan pelatihan. Seperti halnya kabupaten lainnya, pelatihan lebih baik di fokuskan pada aspek fungsional manajemen organisasi seperti manajemen keuangan, manajemen operasi, dan manajemen pemasaran. Pemahaman terhadap aspek strategy organisasi perlu ditingkatkan sehingga pelatihan manajemen strategi juga perlu diberikan. Untuk mengembangkan produk baru perlu diberikan pelatihan tentang penyusunan studi kelayakan usaha (SKU). Dengan pemahaman yang baik dari berbagai aspek diatas maka kinerja koperasi akan ditingkatkan sehingga pelayanan terhadap masyarakat juga akan makin baik, seperti penyerapan tenaga kerja baru dan pembayaran gaji yang memadai pada karyawan yang ada sekarang.

Salah satu penyebab rendahnya aspek kontribusi koperasi terhadap pembangunan karena sebagian besar koperasi lambat dalam penyerahan laporan SPT dan pembayaran pajak kepada kantor pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh lambatnya penyusunan laporan keuangan dan perhitungan pajak pendapatan. Untuk itu perlu pelatihan perpajakan guna meningkatkan pemahaman penyusunan laporan keuangan berbasis komputer dan pelatihan perhitungan pajak dan penyusunan surat pemberitahuan pajak, baik bulanan maupun tahunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penilaian yang dilakukan terhadap koperasi yang berada di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat sebanyak 15 unit atau 13,64 % dari koperasi yang dinilai yang termasuk kedalam kualifikasi berkualitas. Sedangkan sebanyak 68 unit atau 61,82 % termasuk kategori cukup berkualitas, 14 unit atau 12,73 % termasuk

kategori kurang berkualitas. Tidak satupun dari koperasi yang dinilai termasuk kedalam kategori sangat berkualitas, sebagai kualifikasi tertinggi.

2. Dari segi aspek penilaian koperasi maka aspek yang paling baik adalah aspek keaktifan badan usaha dengan nilai rata-rata 68 dari 95 nilai maksimum atau dengan capaian nilai 71,63 %.
3. Aspek penilaian yang paling rendah adalah aspek kontribusi koperasi terhadap pembangunan daerah dengan nilai rata-rata 7 dari 20 nilai maksimum dengan capaian nilai 33,43 %.
4. Dari empat daerah yang dinilai pencapaian nilai yang paling tinggi adalah Kabupaten Solok dengan rata-rata nilai 310 dari 500 nilai maksimum dengan capaian nilai 62,00 %.
5. Terdapat sebanyak 13 unit koperasi atau 11,82 % dari koperasi yang dirating kurang peduli terhadap pelaksanaan rating.
6. Koperasi yang mempunyai kinerja usaha kurang baik, dikarenakan manajemennya kurang memahami bagaimana manajemen keuangan, sehingga kurang mempedulikan struktur permodalan, seperti perbandingan modal sendiri dengan modal pinjaman, perbandingan aktiva dengan pasiva, perbandingan omset dengan bad debt, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas badan usaha.

Saran

Berdasarkan penilaian yang dilakukan dan kesimpulan sebagaimana yang dikemukakan maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan koperasi dimasa yang akan datang harus difokuskan kepada aspek-aspek penilaian rating koperasi dengan nilai capaian yang masih rendah, seperti kinerja usaha, pelayanan kepada masyarakat, dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
2. Hasil rating koperasi ini harus dijadikan pedoman dalam merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan koperasi oleh pemerintah, karena informasi yang disajikan sangat relevan dengan kinerja koperasi yang ada pada daerah yang dinilai.

3. Koperasi yang termasuk kedalam kategori berkualitas harus digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten-kota untuk berbagai kegiatan pemberdayaan, penyaluran kredit pengembangan usaha, dan dijadikan mitra pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan. Jika tidak maka hasil rating akan dianggap tidak ada manfaatnya oleh koperasi dan dimasa yang akan datang mereka akan enggan untuk dinilai kembali.
4. Koperasi-koperasi yang kurang berkualitas perlu mendapat pembinaan yang makin intensif oleh pemerintah, terutama dalam hal aspek kinerja usaha, aspek orientasi pelayanan dan partisipasi anggota.
5. Koperasi-koperasi yang termasuk kedalam kategori cukup berkualitas dan berkualitas dimasa datang disarankan supaya dikelola oleh manajer yang profesional, yaitu yang punyai kemampuan konseptual, human relation dan keterampilan berusaha dengan pendidikan minimal sarjana. Manajer profesional ini agar disiapkan oleh pemerintah, baik melalui pendidikan dan pelatihan dari manajer atau pengurus yang sudah ada, atau dengan melakukan rekrutmen sarjana menjadi manajer koperasi dengan kontrak kerja selama periode tertentu (disarankan dua tahun-dua tahun).
6. Koperasi yang memiliki kualifikasi berkualitas agar dijadikan proyek percontohan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing dan pemberdayaan koperasi-koperasi lainnya.
7. Sosialisasi rating koperasi harus makin ditingkatkan karena masih sangat banyak koperasi yang tidak memahami perlunya rating yang dilakukan. Pembinaan masing-masing koperasi harus disesuaikan dengan aspek penilaian rating koperasi yang bersangkutan.
8. Untuk meningkatkan pengawasan keuangan disarankan agar pemerintah menghidupkan kembali Koperasi Jasa Audit, karena penggunaan Akuntan Publik untuk melakukan audit biayanya tidak terjangkau oleh kebanyakan koperasi. Akibatnya banyak koperasi yang seharusnya diaudit oleh auditor eksternal akan tetapi tidak dilakukan.

9. Kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan koperasi harus miskin ditingkatkan, terutama dalam penelitian dan penyusunan program, peningkatan kemampuan manajerial, serta pendidikan dan pelatihan.
10. Gubernur Propinsi Sumatera Barat harus melaksanakan Perda koperasi yang ada untuk mempercepat dan menumbuh kembangkan kehidupan koperasi ditengah masyarakat. Jika tidak maka dikuatirkan koperasi akan mengalami kehancuran dan kehidupan perkonomian masyarakat terperangkap kepada perekonomian liberal yang menghasilkan banyak ketidak stabilan, ketimpangan dan kemiskinan, pengangguran, dan pengeploitasian sesama pelaku ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

- Brigham, Eugene, F & Fred, J Weston, 2005., *Essentials of Managerial Finance*, Ninth Edition, The Dryden Press International Edition.
- Herman Soewardi, 2005., *Filsafat Koperasi atau Cooperativism*, UPT Penerbitan IKOPIN, Bandung.
- Porter, Michael.E, 2008., *Competitive Advantage*, Fourth Edition, Prantice Hall International, Singapore
- Ropke, Jochen, 2006., *The Economic Theory of Cooperatives*, Second Edition, Marburg University, Germany.
- Yuyun Wirasasmita, 2005., *Fungsi Objektif Koperasi*, Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Menteri Negara Koperasi dan UKM, 2007, *Sistem Pemeringkatan Koperasi*, Kepmen No.. 22/PER/M.KUKM/IV/2007,
- Undang-Undang No.25 Tahun 1992, *Undang-Undang Koperasi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah. No.9 Tahun 1995, *Tentang Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam*, Jakarta.